



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244
Laman <http://bskap.kemdikbud.go.id>

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 032 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN
MENENGAH OLEH SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah oleh Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah oleh Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 962);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH OLEH SATUAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga yang dapat dikonversi dalam bentuk uang.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun untuk penyelenggaraan pendidikan di dalam Satuan Pendidikan.
4. Biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah oleh Satuan Pendidikan ini digunakan sebagai acuan bagi Satuan Pendidikan untuk menyusun penganggaran pendidikan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2023

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,



SUHADI

NIP 196912061992031001

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR,
KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 032 TAHUN 2023

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG
PENDIDIKAN MENENGAH OLEH SATUAN
PENDIDIKAN



PETUNJUK TEKNIS

**PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
OLEH SATUAN PENDIDIKAN**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah oleh Satuan Pendidikan.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai upaya pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendorong satuan pendidikan agar dapat mengoptimalkan perhitungan biaya pendidikan. Petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menyusun rencana pembiayaan pendidikan yang lebih akurat. Selanjutnya, petunjuk teknis ini diharapkan dapat mempermudah satuan pendidikan dalam menggali pendanaan dari berbagai sumber untuk pemenuhan pembiayaan di satuan pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran penyusunan petunjuk teknis ini mulai dari proses penulisan hingga saat peluncuran. Semoga petunjuk teknis ini dapat menjadi panduan bagi seluruh satuan pendidikan dalam menyusun rencana pembiayaan pendidikan yang lebih baik.

Jakarta, Agustus 2023

Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan

Anindito Aditomo, Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Manfaat Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan	3
D. Dasar Hukum	4
BAB II	6
PENGERTIAN BIAYA PENDIDIKAN	6
A. Biaya Operasional	7
B. Biaya Investasi	9
BAB III	12
LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN	12
A. Prinsip-Prinsip Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan	12
B. Tahapan Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan oleh Satuan Pendidikan	12
C. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Operasional Nonpersonalia	14
D. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Operasional Personalia ..	15
E. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Investasi	17
F. Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan Per Peserta Didik Per Tahun ..	19
BAB IV	20
PENUTUP	20
Lampiran 1: Formulir Isian Satuan Biaya Operasional Nonpersonalia	21
Lampiran 2: Formulir Isian Komponen Biaya Operasional Personalia	25
Lampiran 3: Formulir Isian Komponen Biaya Investasi	35
Lampiran 4: Rekapitulasi Biaya Satuan Pendidikan	37
Lampiran 5: Masa Manfaat Barang Investasi	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang berfungsi untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel, dan adil dalam kerangka pendidikan nasional. Dalam konteks tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan pendidikan nasional melalui sebuah sistem pendidikan nasional yang mencakup beberapa komponen yang saling berkaitan. Keseluruhan komponen dalam sistem tersebut harus sesuai dengan standar yang ditentukan agar dapat mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan.

Pelaksanaan pendidikan nasional yang berkualitas membutuhkan sumber daya pendidikan yang memenuhi standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Sumber daya yang memenuhi standar tersebut berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan biaya yang menjadi syarat wajib untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan terlaksana dengan efektif.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab tersebut mengisyaratkan perlunya kolaborasi antarsektor agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha yang memiliki minat dan perhatian terhadap dunia pendidikan, perlu mengerahkan sumber daya yang dimiliki agar pembiayaan pendidikan dapat dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam implementasinya, besarnya biaya pendidikan di satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain visi dan misi satuan pendidikan, jumlah peserta didik, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik, jumlah rombongan belajar, letak geografis, serta harga satuan barang dan jasa setempat.

Selama ini satuan pendidikan belum memiliki panduan dalam menghitung berapa kebutuhan riil anggaran yang diperlukan dalam pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Tidak tersedianya acuan, baik dalam bentuk regulasi maupun petunjuk teknis yang diperlukan sebagai dasar dalam perhitungan biaya satuan pendidikan, menyebabkan satuan pendidikan tidak dapat melakukan estimasi pembiayaan yang dibutuhkan secara pasti. Situasi ini mengakibatkan satuan pendidikan tidak dapat melakukan pemetaan sumber-sumber pembiayaan yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan program pendidikan, baik dari unsur internal maupun unsur eksternal.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu memfasilitasi satuan pendidikan dalam melakukan perhitungan biaya satuan pendidikan melalui petunjuk teknis yang sederhana dan lebih terukur. Bagi satuan pendidikan petunjuk teknis tersebut sangat penting agar mereka dapat membuat perencanaan yang baik, terutama dalam hal perhitungan standar pembiayaan yang diperlukan. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk dasar penetapan sumber pendanaan dan pengelolaan sumber daya secara optimal dan efisien.

Dengan demikian, petunjuk teknis ini perlu dirancang sebagai dasar bagi satuan pendidikan dalam melakukan perhitungan biaya pendidikan. Hal ini merupakan mandat dari Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan perlunya penyusunan petunjuk teknis tata cara perhitungan satuan biaya pendidikan untuk

pemerintah, pemerintah daerah, badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan bagi satuan pendidikan dan badan penyelenggara pendidikan (yayasan, organisasi massa, dan sebagainya) dalam menghitung standar pembiayaan pendidikan per peserta didik per tahun. Secara operasional, satuan pendidikan dapat menggunakan petunjuk teknis ini dalam rangka perhitungan kebutuhan riil besarnya biaya satuan pendidikan yang dibutuhkan satuan pendidikan. Petunjuk teknis ini tentu saja berbeda peruntukannya dengan laporan penggunaan dana yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Dalam konteks yang lebih luas, petunjuk teknis ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas penganggaran pendidikan sehingga satuan pendidikan dapat meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

B. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. menyamakan persepsi warga satuan pendidikan (kepala satuan pendidikan, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua peserta didik) dan badan penyelenggara pendidikan tentang komponen pembiayaan pendidikan dan pentingnya perhitungan biaya satuan pendidikan;
2. memberikan panduan bagi warga satuan pendidikan tentang tata cara perhitungan satuan biaya pendidikan di satuan pendidikan; dan
3. membantu satuan pendidikan dalam menyusun rencana penganggaran yang baik dan akurat.

C. Manfaat Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan

Perhitungan satuan biaya pendidikan akan memberikan manfaat bagi warga satuan pendidikan, masyarakat, dan badan penyelenggara satuan pendidikan (sekolah swasta). Bagi sekolah, manfaat perhitungan satuan biaya pendidikan adalah sebagai pedoman dalam menyusun anggaran penyelenggaraan program pendidikan dan sebagai alat untuk menjamin agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan independen. Hal itu dimungkinkan karena pembiayaan dihitung secara detail oleh tim perhitungan di sekolah. Perhitungan itu juga dapat digunakan untuk mengomunikasikan kebutuhan anggaran tambahan sekolah kepada pihak-pihak yang berpotensi untuk memberikan bantuan

dana, misalnya orang tua, pelaku usaha/industri, alumni, dan organisasi masyarakat apabila dana BOSP atau BOSP daerah tidak mencukupi.

Selain itu, manfaat perhitungan satuan biaya pendidikan bagi masyarakat/orang tua adalah sebagai bentuk transparansi informasi tentang biaya yang dibutuhkan oleh sekolah dalam memberikan layanan pendidikan bermutu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masyarakat akan memperoleh informasi mengenai postur anggaran pendidikan di tingkat satuan pendidikan, termasuk besarnya dana tambahan yang masih dibutuhkan sekolah untuk menutupi kekurangan dalam penyelenggaraan program pendidikan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang

Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.

BAB II

PENGERTIAN BIAYA PENDIDIKAN

Secara umum biaya pendidikan dapat didefinisikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga (yang dapat dikonversi dalam bentuk uang). Biaya pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab dari berbagai pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat maupun pelaku usaha yang memiliki minat dan perhatian terhadap dunia pendidikan. Hal itu merupakan bentuk partisipasi dari pihak-pihak tersebut dalam mendorong pelaksanaan pendidikan yang efisien dan efektif.

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, yang disebut biaya pendidikan mencakup tiga jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Dalam perkembangannya, untuk menjawab dinamika dan kebutuhan pengelolaan pendidikan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional, yang salah satunya, mengatur standar pembiayaan. Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, satuan pendidikan wajib memenuhi kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan yang diatur dalam peraturan itu. Dalam regulasi tersebut diatur jenis pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional (nonpersonalia dan personalia).

Sejalan dengan peraturan tersebut, yang dimaksud pembiayaan pendidikan dalam petunjuk teknis ini adalah pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional yang dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pendidikan sangat berpengaruh terhadap mutu dan keberlangsungan pendidikan. Oleh karena itu, perhitungan satuan biaya pendidikan, baik investasi maupun operasional, sangat krusial sebab jenis pembiayaan tersebut akan menentukan perencanaan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Pada bab ini akan diuraikan komponen dan subkomponen biaya pendidikan yang disarikan dari Permendikbudristek Nomor 18 Tahun

2023 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Uraian dalam bab ini bertujuan agar semua pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan dan badan penyelenggara pendidikan memahami dan memiliki persepsi yang sama tentang komponen biaya pendidikan.

A. Biaya Operasional

Biaya operasional meliputi komponen biaya personalia dan nonpersonalia.

1. Biaya operasional nonpersonalia

Biaya operasional nonpersonalia merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Biaya operasional nonpersonalia meliputi komponen-komponen biaya sebagai berikut:

a. Bahan

Biaya bahan merupakan biaya penyediaan bahan minimal habis pakai di suatu satuan pendidikan yang dapat berupa bahan operasional kantor, bahan praktikum, bahan kesehatan (termasuk bahan peningkatan gizi bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini), bahan pembelajaran, bahan sanitasi, bahan konsumsi kegiatan, dan/atau bahan cetakan.

b. Perlengkapan

Biaya perlengkapan merupakan biaya penyediaan barang yang dapat berupa perlengkapan kantor, perlengkapan pembelajaran, perlengkapan praktikum, dan/atau perlengkapan perpustakaan.

c. Peralatan

Biaya peralatan merupakan biaya perolehan peralatan yang dapat berupa peralatan kantor, peralatan pembelajaran, peralatan praktikum, peralatan kebersihan dan sanitasi, dan/atau peralatan perpustakaan.

d. Daya

Biaya daya merupakan biaya daya berlangganan yang diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan. Biaya ini dapat berupa biaya untuk air, listrik, dan/atau gas.

e. Jasa

Biaya jasa merupakan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa yang mendukung layanan pendidikan. Biaya ini dapat berupa biaya jasa telekomunikasi, jasa aplikasi atau perangkat lunak, jasa asuransi sarana dan prasarana, jasa profesional, jasa uji kompetensi keahlian peserta didik pada sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa, dan/atau jasa pengiriman barang.

f. Biaya transportasi

Biaya transportasi merupakan biaya yang digunakan untuk perjalanan dalam rangka penugasan terkait dengan kegiatan satuan pendidikan bagi pendidik, tenaga kependidikan selain pendidik, dan peserta didik.

g. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana

Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana.

h. Biaya bank

Biaya bank merupakan biaya yang rutin dikeluarkan untuk pengurusan administrasi bulanan, transaksi, dan pelaporan.

i. Biaya pajak

Biaya pajak merupakan biaya yang menjadi tanggungan satuan pendidikan yang dapat berupa pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa, dan/atau pajak bumi dan bangunan.

Komponen dan besaran biaya operasional nonpersonalia ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar,
 - b. jumlah peserta didik,
 - c. jumlah tenaga kependidikan (termasuk tenaga kependidikan berkebutuhan khusus),
 - d. jumlah, jenis, dan kriteria sarana dan prasarana,
 - e. letak dan kondisi geografis,
 - f. peserta didik berkebutuhan khusus,
 - g. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan,
 - h. standar kemahalan daerah, dan
 - i. pertimbangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan.
2. Biaya operasional personalia

Biaya operasional personalia merupakan penghasilan yang diberikan kepada tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya operasional personalia dirancang berdasarkan masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan yang diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

B. Biaya Investasi

Biaya investasi meliputi komponen biaya (1) investasi lahan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, (3) penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan (4) modal kerja tetap.

1. Biaya investasi lahan

Biaya investasi lahan merupakan biaya yang disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan untuk menyediakan lahan satuan pendidikan sehingga pengelola dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

2. Biaya penyediaan sarana dan prasarana

Biaya penyediaan sarana dan prasarana merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang, dan sarana

pendidikan. Sarana pendidikan yang dimaksud meliputi bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui pembelian, penyewaan, pertukaran, peminjaman, hibah, wakaf, dan kerja sama berbagai sumber daya dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, pelaku industri, dan/atau pemangku kepentingan lain.

3. Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia

Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan jumlah tenaga kependidikan dan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik. Pendidik mencakup tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan selain pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. Biaya penyediaan jumlah tenaga kependidikan merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi jumlah tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pengembangan kompetensi tenaga kependidikan merupakan biaya yang digunakan untuk memenuhi standar kompetensi minimal tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Biaya modal kerja tetap

Biaya modal kerja tetap merupakan sejumlah modal berbentuk uang dan/atau barang yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu. Biaya modal kerja tetap digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan baru, pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh satuan pendidikan, dan/atau keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan kahar. Keadaan kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari

sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena faktor bencana alam, peperangan, dan sejenisnya.

Biaya modal kerja tetap untuk penyelenggaraan satuan pendidikan baru merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan berjalannya layanan pendidikan di satuan pendidikan baru sampai dengan adanya sumber pendanaan rutin dan berkelanjutan. Biaya modal kerja tetap untuk pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh satuan pendidikan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung dan/atau membentuk suatu unit usaha atau unit produksi yang dikelola oleh satuan pendidikan demi keberlangsungan proses pembelajaran. Biaya modal kerja tetap untuk keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan kahar merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan satuan pendidikan dalam keadaan yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh satuan pendidikan.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

A. Prinsip-Prinsip Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan

Sebelum melakukan perhitungan biaya pendidikan di satuan pendidikan, terdapat prinsip-prinsip yang perlu dilakukan, antara lain:

1. integritas, yaitu perhitungan dilakukan secara jujur;
2. objektif, yaitu perhitungan berdasarkan data dan fakta yang ada;
3. terbuka, yaitu perhitungan disusun secara terbuka untuk dievaluasi oleh semua pihak.
4. partisipatif, yaitu perhitungan dilaksanakan dengan melibatkan warga satuan pendidikan melalui musyawarah mufakat;
5. akuntabel, yaitu perhitungan dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. berkelanjutan, yaitu perhitungan dilakukan secara terus menerus dan memiliki dampak jangka panjang bagi satuan pendidikan.

B. Tahapan Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Dalam melakukan perhitungan satuan biaya pendidikan, dibutuhkan langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Hal itu dilakukan demi kelancaran perhitungan biaya pendidikan. Oleh karena itu, petunjuk teknis disusun untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah teknis yang perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh satuan pendidikan. Langkah-langkah teknis dan satuan pendidikan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala satuan pendidikan membentuk tim perhitungan biaya pendidikan melalui surat keputusan pengangkatan tim perhitungan biaya satuan pendidikan.
2. Tim perhitungan biaya satuan pendidikan memiliki anggota minimal empat orang yang memiliki pengalaman di bidang keuangan. Tim itu terdiri atas wakil kepala sekolah, bendahara, staf administrasi, guru atau koordinator program, dan perwakilan komite sekolah atau perwakilan yayasan (bagi satuan pendidikan swasta). Untuk sekolah menengah kejuruan (SMK), tim melibatkan ketua program keahlian, sedangkan untuk satuan pendidikan dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD), tim melibatkan anggota sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang.

3. Kepala satuan pendidikan memberikan penugasan kepada tim perhitungan satuan biaya pendidikan untuk melakukan kajian dan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
4. Tugas dan tanggung jawab tim perhitungan satuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi perencanaan perhitungan satuan biaya pendidikan;
 - b. mengumpulkan dan melakukan telaah data-data mengenai jenis-jenis pengeluaran satuan pendidikan dalam jangka waktu 1 tahun;
 - c. melakukan survei harga di daerah setempat mengenai harga satuan per jenis biaya;
 - d. melakukan rapat koordinasi dengan guru untuk mengumpulkan data mengenai frekuensi dan volume penggunaan per jenis biaya selama 1 tahun;
 - e. melakukan perhitungan satuan biaya pendidikan berdasarkan komponen biaya pendidikan yang mencakup (1) biaya investasi (investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap), (2) biaya operasional personalia (gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan), dan (3) biaya operasional nonpersonalia (bahan, perlengkapan, peralatan, daya, jasa, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya bank, dan biaya pajak);
 - f. menyusun laporan hasil perhitungan satuan biaya pendidikan; dan
 - g. melaporkan hasil perhitungan biaya pendidikan kepada kepala satuan pendidikan.
5. Kepala satuan pendidikan melakukan telaah hasil perhitungan biaya pendidikan yang telah dilakukan oleh tim perhitungan biaya.
6. Kepala satuan pendidikan menetapkan hasil perhitungan satuan biaya pendidikan yang telah dikerjakan tim perhitungan biaya.
7. Kepala satuan pendidikan melakukan sosialisasi hasil perhitungan biaya pendidikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan satuan pendidikan.
8. Satuan pendidikan menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) berdasarkan hasil perhitungan satuan biaya pendidikan.

C. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Operasional Nonpersonalia

Perhitungan biaya operasional nonpersonalia dilakukan untuk menghitung kebutuhan minimal yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Dalam melakukan proses perhitungan biaya operasional nonpersonalia, terdapat rumus umum yang dapat digunakan oleh tim perhitungan biaya satuan pendidikan. Berikut ini rumus umum perhitungan biaya operasional nonpersonalia.

$$SBONP = \frac{\sum_{i=1}^n (V_i \times H_i)}{M}$$

Keterangan

SBONP: satuan biaya operasional nonpersonalia

i : jenis biaya operasional nonpersonalia ke-*i* ($i = 1, 2, \dots, n$)

V_i : volume/kuantitas/jumlah jenis biaya ke-*i* dalam 1 tahun

H_i : harga jenis biaya ke-*i*

M : banyaknya peserta didik pada tahun berjalan

Langkah-langkah konkret penghitungan biaya operasional nonpersonalia adalah sebagai berikut:

1. Tim mengidentifikasi semua jenis barang/jasa yang harus dibeli atau dibayar dalam 1 tahun anggaran. Barang/jasa yang dimaksud adalah yang termasuk dalam kategori biaya operasional nonpersonalia.
2. Tim menuliskan jenis barang/jasa ke dalam kolom (2) sesuai dengan kelompok belanja pada formulir yang terdapat pada *Lampiran 1*. Daftar barang/jasa yang telah tertulis pada kolom (2) dalam tabel tersebut adalah contoh. Tim disilakan menyesuaikannya dengan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing.
3. Tim menuliskan satuan dari barang/jasa yang akan dibayar pada kolom (3). Misalnya, satuan kertas HVS adalah rim, satuan spidol adalah lusin (boks), dan satuan pembayaran berlangganan listrik adalah bulan.
4. Tim menuliskan volume atau jumlah barang yang dibeli dalam 1 tahun pada kolom (4). Sebagai contoh, jika jumlah kertas HVS yang dibeli sebanyak 50 rim, kolom diisi dengan angka 50. Untuk jasa pembayaran listrik, kolom diisi dengan angka 12 (bulan). Untuk

menentukan volume barang yang akan dibeli dalam 1 tahun, jumlahkan barang yang akan dibeli per kegiatan di satuan pendidikan. Formulir yang terdapat dalam *Lampiran 1* merupakan rekapitulasi selama 1 tahun. Untuk mengetahui cara membuat rekapitulasi tersebut, tim dapat menggunakan bantuan aplikasi yang memerinci per kegiatan.

5. Tim menuliskan harga satuan barang/jasa pada kolom (5). Harga barang yang diisikan termasuk pajak yang harus dibayar (jika ada), termasuk biaya transportasi untuk membeli barang tersebut. Untuk jasa, misalnya listrik, diisikan perkiraan rata-rata harga satuan per bulan. Untuk transportasi perjalanan dinas, diisikan pengeluaran minimal yang disesuaikan dengan standar biaya masukan.
6. Total biaya yang terdapat pada kolom (6) merupakan perkalian antara kolom (4) dan kolom (5).
7. Setelah semua jenis biaya terisikan dalam *Lampiran 1*, akan diperoleh jumlah biaya total untuk semua kegiatan operasional nonpersonalia dari kolom (6), misalnya sebesar A.
8. Satuan biaya operasional nonpersonalia per peserta didik per tahun (SBONP) diperoleh dari jumlah biaya total (A) dibagi dengan jumlah peserta didik (M). Formula perhitungannya adalah $SBONP=A/M$.

D. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Operasional Personalia

Perhitungan biaya operasional personalia dilakukan untuk menghitung kebutuhan minimal yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Rumus perhitungan satuan biaya operasional personalia pada prinsipnya sama dengan biaya operasional nonpersonalia. Berikut ini rumus umum perhitungan satuan biaya operasional personalia.

$$SBOP = \frac{\sum_{i=1}^n (V_i \times H_i)}{M}$$

Keterangan

SBOP : satuan biaya operasional personalia

i : jenis biaya operasional personalia ke-*i* ($i = 1, 2, \dots, n$)

V_i : volume/kuantitas/jumlah jenis biaya ke-*i* dalam 1 tahun

H_i : harga jenis biaya ke-*i*

M : banyaknya peserta didik pada tahun berjalan

Langkah-langkah konkret penghitungan biaya operasional personalia adalah sebagai berikut:

1. Tim mengidentifikasi jenis pengeluaran pada satuan pendidikan yang termasuk dalam kategori biaya operasional personalia. Jenis pengeluaran yang dimaksud berupa biaya untuk membayar gaji pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik dalam 1 tahun anggaran.
2. Tim menuliskan jenis pembayaran gaji ke dalam kolom (2) sesuai dengan kelompok biaya pada *Lampiran 2*. Pembayaran gaji ditentukan berdasarkan masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan.
3. Tim menuliskan jenis pembayaran tunjangan ke dalam kolom (2) sesuai dengan kelompok biaya pada *Lampiran 2*. Pembayaran tunjangan ditentukan berdasarkan masa kerja, beban kerja, kinerja, dan tingkat jabatan. Jenis tunjangan yang dibayarkan, di antaranya a) tunjangan kesehatan, b) tunjangan keluarga, c) tunjangan masa kerja, dan d) tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tim menuliskan satuan pembayaran pada kolom (3). Misalnya, isikan satuan *bulan* untuk gaji/honor bulanan atau *1 tahun* untuk tunjangan hari raya.
5. Tim menuliskan frekuensi atau jumlah pembayaran setiap bulan dalam 1 tahun anggaran pada kolom (4). Frekuensi yang dimaksud adalah jenis pembayaran yang dikeluarkan satuan pendidikan untuk membayar total pendidik/tenaga kependidikan selain pendidik aparatur sipil negara (ASN) untuk 1 bulan. Selanjutnya, tim mengisikab volume atau jumlah total pembayaran dalam 1 tahun anggaran pada kolom (5). Volume yang dimaksud di sini adalah jenis pembayaran yang dikeluarkan satuan pendidikan untuk membayar jumlah total pendidik/tenaga kependidikan selain pendidik aparatur sipil negara (ASN) untuk 1 tahun anggaran. Misalnya, jika dalam satu satuan pendidikan terdapat sepuluh guru honorer (lihat kolom 4), satuan pendidikan akan mengeluarkan biaya untuk sepuluh guru

tersebut selama 12 bulan sehingga volumenya =120, sedangkan untuk tunjangan hari raya volumenya =10.

6. Tim menuliskan biaya satuan dalam kolom (6).
7. Total biaya yang terdapat pada kolom (7) merupakan perkalian antara kolom (5) dan kolom (6).
8. Setelah semua jenis biaya terisikan dalam *Lampiran 2*, akan diperoleh jumlah biaya total untuk semua kegiatan (penjumlahan dari kolom (7) yang dikodekan dengan B).
9. Biaya operasional personalia per tahun diperoleh dari B dibagi dengan jumlah peserta didik (M) sehingga formula perhitungannya adalah $SBOP = B/M$.

E. Langkah-Langkah Teknis Perhitungan Biaya Investasi

Perhitungan biaya investasi dilakukan untuk menghitung kebutuhan minimal yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Rumus umum perhitungan satuan biaya investasi adalah sebagai berikut.

$$SBINV = \frac{\left(\sum_{i=1}^n \frac{(V_i \times H_i)}{T_i} \right)}{M}$$

Keterangan

$SBINV$: satuan biaya investasi

i : jenis biaya investasi ke- i ($i = 1, 2, \dots, n$)

V_i : volume/kuantitas/jumlah jenis biaya ke- i

H_i : harga perolehan per satuan per jenis biaya ke- i

M : banyaknya peserta didik pada tahun berjalan

T : perkiraan masa manfaat biaya investasi

Langkah-langkah konkret penghitungan biaya investasi adalah sebagai berikut:

1. Tim mengidentifikasi semua jenis barang/jasa berkategori biaya investasi yang harus dibeli atau dibayar.

2. Tim menuliskan jenis barang/jasa ke dalam kolom (1) sesuai dengan kelompok belanja pada *Lampiran 3*.
3. Tim menuliskan satuan dari barang/jasa yang akan dibayar pada kolom (2). Misalnya, satuan untuk membeli lahan adalah meter persegi (m^2), komputer (set), meja kursi (set), dan sebagainya.
4. Tim menuliskan jumlah barang yang dibeli pada kolom (3), misalnya isikan angka 3 untuk pembelian tiga set meja dan kursi.
5. Tim menuliskan harga perolehan barang/jasa yang dibeli pada kolom (4). Misalnya, Rp500.000,00 untuk harga satu set meja dan kursi yang dibeli dengan harga Rp500.000,00.
6. Total biaya perolehan pada kolom (5) merupakan perkalian antara kolom (3) dan kolom (4).
7. Tim menuliskan masa manfaat pada kolom (6). Masa manfaat adalah jumlah tahun suatu barang/jasa yang dapat bermanfaat bagi satuan pendidikan.
8. Tim menuliskan masa manfaat untuk investasi lahan dan biaya penyediaan sarana prasarana. Misalnya, untuk bangunan yang memiliki masa manfaat 50 tahun, tuliskan angka 50 pada kolom (6). Contoh lain, untuk biaya sewa bangunan dengan masa sewa 10 tahun, tuliskan angka 10 pada kolom (6). Masa manfaat beberapa jenis barang/jasa lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 5*. Tabel masa manfaat yang tertera pada *Lampiran 5* sesuai dengan *Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 295/KM.6/2019*. Apabila pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan kepala daerah (peraturan gubernur, bupati, atau wali kota), satuan pendidikan dapat merujuk pada perkara setempat.
9. Masa manfaat untuk biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah jumlah tahun sampai dengan berakhirnya masa purnabakti setiap tenaga kependidikan. Misalnya, untuk guru yang direkrut pada umur 25 tahun, biaya rekrutmen dan pelatihan awal prajabatannya memiliki masa manfaat selama 35 tahun (pensiun di usia 60 tahun). Namun, untuk biaya pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang memiliki jangka waktu tertentu, masa manfaatnya adalah sepanjang periode berlakunya sertifikasi kompetensi tersebut. Misalnya, sertifikasi kompetensi untuk seorang guru SMK memiliki jangka waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Masa

manfaat yang dimilikinya itu adalah 3 tahun (dari tahun 2021 hingga tahun 2023).

10. Masa manfaat untuk modal kerja tetap adalah sepanjang umur satuan pendidikan. Penyelenggara satuan pendidikan dapat menggunakan pertimbangan dalam memperkirakan masa manfaat modal kerja tetap. Misalnya, masa manfaat untuk modal kerja ditetapkan sebesar 50 tahun.
11. Alokasi biaya per tahun pada kolom (7) diperoleh dengan membagi total biaya perolehan pada kolom (5) dengan masa manfaat di kolom (6). Misalnya, total biaya perolehan set komputer sebesar Rp20.000.000,00 dibagi masa manfaat 4 tahun adalah sebesar Rp5.000.000,00 per tahun. Biaya sebesar Rp5.000.000,00 dituliskan pada kolom (7).
12. Setelah semua jenis biaya terisikan pada *Lampiran 3*, akan diperoleh jumlah biaya total yang merupakan penjumlahan dari semua biaya investasi per tahun pada kolom (7).
13. Biaya investasi per tahun diperoleh dari C dibagi dengan jumlah peserta didik (M) sehingga formula perhitungannya adalah $SBINV = C/M$.

F. Perhitungan Satuan Biaya Pendidikan Per Peserta Didik Per Tahun

Setelah biaya satuan pendidikan per peserta didik per tahun untuk ketiga jenis komponen sudah dihitung, biaya satuan pendidikan secara keseluruhan dapat dihitung melalui *Lampiran 4*. Perhitungannya dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan bagi satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan program pendidikan berbasis pembiayaan yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan melalui optimalisasi perhitungan biaya pendidikan. Petunjuk teknis ini sangat penting bagi satuan pendidikan karena dengan mengikuti petunjuk teknis ini, satuan pendidikan dapat menyusun rencana pembiayaan pendidikan secara akurat melalui identifikasi berbagai kebutuhan pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, satuan pendidikan akan lebih mudah dalam menggali sumber pendanaan untuk pemenuhan pembiayaan di satuan pendidikan.

Petunjuk teknis ini memuat langkah-langkah perhitungan pembiayaan yang sangat berguna dalam menyusun perencanaan pembiayaan pendidikan bagi satuan pendidikan. Dengan adanya petunjuk teknis ini, satuan pendidikan dapat menyusun perencanaan program pendidikan dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan pembiayaan sehingga pelaksanaan program pendidikan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Satuan pendidikan diharapkan dapat menggunakan buku *Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Biaya* ini dengan baik. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan program pendidikan yang muaranya adalah peningkatan mutu satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN

Provinsi	
Kabupaten/Kota	
Nama Sekolah	
NPSN	
Jenjang	
Status (Negeri/Swasta)	
Jumlah Peserta Didik	

Lampiran 1: Formulir Isian Satuan Biaya Operasional Nonpersonalia

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bahan				0
	Bahan operasional kantor				0
	Kertas HVS	Rim	50	Rp40.000,00	Rp2.000.000,00
	Spidol				
	Penghapus Papan Tulis				
	Penggaris Papan Tulis				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan praktikum				0
	Kapas				
	Air raksa				
	Milimeter Blok				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan kesehatan termasuk peningkatan gizi bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini				0
	Bakso				
	Telur				
	Buah Jeruk				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan pembelajaran				
	Bola kasti				
	Bola Voli				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan sanitasi				
	Kain Pel				
	Sapu				

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Konsumsi kegiatan				
	Rapat penerimaan peserta didik baru				
	Rapat evaluasi semester				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Bahan cetakan				
	Pencetakan buku teks keluarga				
	Buku atau majalah <i>Tema</i> untuk anak berusia 5—6 tahun dan bermuatan <i>steam digi</i>				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
2	Perlengkapan				0
	Kantor				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Pembelajaran				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Praktikum				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Perpustakaan				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
3	Peralatan				0
	Kantor				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Pembelajaran				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Praktikum				0

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Kebersihan dan sanitasi				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
	Perpustakaan				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
4	Daya				0
	Langganan daya untuk air				0
	Langganan daya untuk listrik				0
	Langganan daya untuk gas				0
5	Jasa				0
	Telekomunikasi				0
	Aplikasi atau perangkat lunak				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				0
6	Transportasi				0
	Perjalanan dinas kepala sekolah				0
	Perjalanan dinas pendidik				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				0
8	Pemeliharaan sarana dan prasarana				
	Pemeliharaan kelas				0
	Pemeliharaan kantor				
	Pemeliharaan halaman				
	Pemeliharaan jaringan				
	Pengecatan gedung				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
9	Bank				0
	Administrasi bulanan				0
	Transaksi				0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				
10	Pajak				0
	Kendaraan				0

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertambahan nilai pada saat pengadaan barang dan jasa				
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)				0
Total biaya operasional personalia					A

Lampiran 2: Formulir Isian Komponen Biaya Operasional Personalia

(Contoh jumlah guru/tenaga kependidikan dengan jumlah tiap-tiap sepuluh orang)

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Gaji tenaga kependidikan					0
	Gaji guru					
	A. Guru PPNPN					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB (Orang/bulan)	10	120	Rp4.000.000,0 0	Rp480.000.00 0,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	B. Guru kontrak					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,0 0	Rp480.000,00 0,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	C. Guru PPPK					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,0 0	Rp480.000.00 0,00

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	D. Guru PNS					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,0 0	Rp480.000.00 0,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	Gaji Pegawai/Staf					
	A. Pegawai PPNPN					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,0 0	Rp480.000.00 0,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	B. Pegawai kontrak					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,0 0	Rp480.000.00 0,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	C. Pegawai PPPK					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,0 0	Rp480.000.00 0,00
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
	D. Pegawai PNS					
	1) Masa kerja 4 tahun pertama	OB	10	120	Rp4.000.000,0 0	Rp480.000.00 0,00

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2) Masa kerja 4 tahun kedua					
	3) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	4) Masa kerja 4 tahun keempat					
	5) Masa kerja 4 tahun kelima					
	6) Masa kerja 4 tahun keenam					
II	Tunjangan tenaga kependidikan					
	Guru					
	A. Guru PPNPN					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,0 0	Rp480.000.00 0,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	B. Guru kontrak					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	C. Guru PPPK					
	1) Tunjangan kesehatan					
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	D. Guru PNS					
	1) Tunjangan kesehatan					
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	Pegawai					
	A. Pegawai PPNPN					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	B. Pegawai Kontrak					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	C. Pegawai PPPK					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4 tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
	D. Pegawai PNS					
	1) Tunjangan kesehatan	OB	10	120	Rp4.000.000,00	Rp480.000.000,00
	2) Tunjangan keluarga					
	3) Tunjangan masa kerja					
	a) Masa kerja 4 tahun pertama					
	b) Masa kerja 4 tahun kedua					
	c) Masa kerja 4 tahun ketiga					
	d) Masa kerja 4 tahun keempat					
	e) Masa kerja 4 tahun kelima					
	f) Masa kerja 4					

No	Jenis Biaya	Satuan/ Bulan	Frekuensi /Bulan	Volume/ Tahun	Harga Satuan	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tahun keenam					
	4) Tunjangan lainnya (jika ada)					
	a) ...					
	b) ...					
Total biaya operasional personalia						B

Lampiran 3: Formulir Isian Komponen Biaya Investasi

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Perolehan Persatuan	Total Biaya Perolehan	Masa Manfaat*	Total Biaya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)×(4)	(6)	(7)=(5)/(6)
1	Biaya investasi lahan						0
	Lahan kantor ...						0
	Lahan ruang kelas						0
	Lahan lapangan ...						0
	Lahan sarana olah raga	m ²	200				0
	Lahan taman lingkungan sekolah						
	Sewa lahan						
	Lahan sumber daya belajar (laboratorium, perpustakaan, dsb.)						
2	Biaya penyediaan sarana dan prasarana						0
	Prasarana						
	Ruang kelas						0
	Ruang perpustakaan						0
	Ruang laboratorium Biologi						0
	Ruang laboratorium Fisika						0
	Ruang laboratorium Kimia						0
	Ruang laboratorium Komputer						
	Ruang laboratorium Bahasa						
	Ruang pimpinan						
	Ruang guru						
	Ruang tata usaha						
	Tempat beribadah						
	Ruang konseling						
	Ruang UKS/M						

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Perolehan Persatuan	Total Biaya Perolehan	Masa Manfaat*	Total Biaya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)×(4)	(6)	(7)=(5)/(6)
	Ruang organisasi kesiswaan						
	Jamban						
	Gudang						
	Ruang sirkulasi						
	Tempat bermain/berola hraga						
	Sarana						
	Kursi peserta didik						
	Meja peserta didik						
	Komputer	unit	5	Rp20.000.00 0,00	Rp100.000.00 0,00	4	Rp25.000.000, 00
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)						
3	Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia						0
	Penyediaan tenaga kependidikan selain pendidik						0
	Pengembangan /peningkatan kompetensi tenaga kependidikan selain pendidik						0
	Pengembangan inovasi terkait Pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran, dan kompetensi tenaga kependidikan						0
	... dan seterusnya (diisi sesuai kebutuhan yang relevan)						0
	...						0

No	Jenis Biaya	Satuan	Vol.	Harga Perolehan Persatuan	Total Biaya Perolehan	Masa Manfaat*	Total Biaya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)×(4)	(6)	(7)=(5)/(6)
4	Biaya modal kerja tetap						0
	Penyelenggara n satuan pendidikan baru						0
	Pengembangan unit usaha atau unit produksi oleh satuan pendidikan, ...						0
	Keberlangsunga n satuan pendidikan dalam keadaan kahar, ...						0
Total biaya investasi							C

Lampiran 4: Rekapitulasi Biaya Satuan Pendidikan

No	Biaya	Total Biaya per Peserta Didik
1	Operasional nonpersonalia	<i>SBONP</i>
2	Operasional personalia	<i>SBOP</i>
3	Investasi	<i>SBINV</i>
Satuan biaya total		<i>SBONP + SBOP + SBINV</i>

Lampiran 5: Masa Manfaat Barang Investasi

Lampiran ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Masa Manfaat I

NO	Uraian	Umur / Masa Manfaat	
		Tahun	Semester
1.	Alat angkutan		
	Alat angkutan darat bermotor	7	14
	Alat angkutan darat tak bermotor	2	4
	Alat angkutan apung bermotor	10	20
	Alat angkutan tak bermotor	3	6
2.	Alat bengkel		
	Alat bengkel bermesin	10	20
	Alat bengkel tak bermesin	5	10
3.	Alat pertanian		
	Alat pengolahan pertanian	4	8
4.	Alat kantor & rumah tangga		
	Alat kantor	5	10
	Alat rumah tangga	5	10
5.	Alat studio dan komunikasi		
	Alat studio	5	10
	Alat komunikasi	5	10
6.	Alat kesehatan		
	Alat kesehatan umum	5	10
7.	Alat laboratorium		
	Unit alat laboratorium	8	16
	Unit alat laboratorium fisika nuklir/ elektronika	15	30
	Alat proteksi radiasi/ proteksi lingkungan	10	20
	<i>Radiation application & non destructive testing laboratory</i>	10	20
	Alat laboratorium lingkungan hidup	7	14
	Peralatan laboratorium hydrodinamiva	15	30
	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi & instrum	10	20
8.	Komputer		
	Komputer unit	4	8
	Peralatan komputer	4	8
9.	Alat eksplorasi		
	Alat eksplorasi topografi	5	10
	Alat eksplorasi geofisika	10	20
10	Alat pengeboran		
	Alat pengeboran mesin	10	20

NO	Uraian	Umur / Masa Manfaat	
		Tahun	Semester
	Alat pengeboran non mesin	10	20
11	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian		
	Sumur	10	20
	Produksi	10	20
	Pengolahan dan pemurnian	15	30
12	Alat bantu eksplorasi		
	Alat bantu eksplorasi	10	20
	Alat bantu produksi	10	20
13	Alat keselamatan kerja		
	Alat deteksi	5	10
	Alat pelindung	5	10
14	Alat peraga		
	Alat peraga pelatihan dan percontohan	10	20
15	Peralatan proses/ produksi		
	Unit peralatan proses/ produksi	8	16
16	Rambu-rambu		
	Rambu-rambu lalu lintas darat	7	14
	Rambu-rambu lalu lintas udara	5	10
	Rambu-rambu lalu lintas laut	15	30
17	Peralatan olahraga		
	Peralatan olahraga	3	6
18	Bangunan gedung		
	Bangunan gedung tempat kerja	50	100
	Bangunan gedung tempat tinggal	50	100
19	Bangunan air		
	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30	60
	Bangunan air bersih/ air baku	40	80
	Bangunan air kotor	40	80
20	Instalasi		
	Instalasi air bersih / air baku	30	60
	Instalasi air kotor	30	60
	Instalasi pengolahan sampah	10	20
	Instalasi pengolahan bahan bangunan	10	20
	Instalasi gardu listrik	40	80
21	Jaringan		
	Jaringan air minum	30	60
	Jaringan listrik	40	80
	Jaringan telepon	20	40
	Jaringan gas	30	60
22	Barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga	4	8

	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30	60
--	--	----	----

	Bangunan air bersih/ air baku	40	80
--	-------------------------------	----	----

Masa Manfaat untuk Overhaul/Renovasi/Perbaikan

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
23.	Alat angkutan				
	Alat angkutan darat bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Alat angkutan darat tak bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
	Alat angkutan apung bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	6	12
	Alat angkutan apung tak bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
24.	Alat bengkel				
	Alat bengkel bermesin	Overhaul	> 0% s.d 25%	1	2
			> 25% s.d 50%	2	4
			> 50% s.d 75%	3	6
			> 75% s.d 100%	4	8
	Alat bengkel tak bermesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	1	2
25.	Alat pertanian				
	Alat pengolahan pertanian	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1	2
			> 20% s.d. 40%	2	4
			> 40% s.d. 75%	5	10
26.	Alat kantor dan rumah tangga				
	Alat kantor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat rumah tangga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%		
27. Alat studio dan komunikasi					
	Alat studio	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat komunikasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	1
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
28. Alat kesehatan umum					
	Alat kesehatan umum	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
29. Alat laboratorium					
	Unit alat laboratorium	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%		
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Alat laboratorium fisika nuklir/ elektronika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
	Alat proteksi radiasi/ proteksi lingkungan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
	<i>Radiation application & non destructive testing laboratory</i>	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
	Alat laboratorium lingkungan hidup	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Peralatan laboratorium hidrodinamika	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
30. Alat eksplorasi					
	Alat eksplorasi topografi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat eksplorasi geofisika	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
31. Alat pengeboran					
	Alat pengeboran mesin	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
	Alat pengeboran nonmesin	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
				> 75% s.d. 100%	2
32. Alat produksi, pengolahan, dan pemurnian					
	Sumur	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Produksi	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	1	2
			> 75% s.d. 100%	2	4
	Pengolahan dan pemurnian	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3	6
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	8	16
33. Alat bantu eksplorasi					
	Alat bantu eksplorasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
	Alat bantu produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	6	12
			> 75% s.d. 100%	7	14
34. Alat keselamatan kerja					
	Alat deteksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	3	6
	Alat pelindung	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0	0
			> 25% s.d. 50%	0	0
			> 50% s.d. 75%	1	2

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
			> 75% s.d. 100%	2	4
35. Alat peraga					
	Alat peraga pelatihan dan percontohan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	4	8
			> 50% s.d. 75%	5	10
			> 75% s.d. 100%	5	10
36. Peralatan proses/ produksi					
	Unit peralatan proses/ produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	3	6
			> 50% s.d. 75%	4	8
			> 75% s.d. 100%	4	8
37. Rambu-rambu					
	Rambu-rambu lalu lintas darat	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	3	6
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Rambu-rambu lalu lintas udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	2	4
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	4	8
	Rambu-rambu lalu lintas laut	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2	4
			> 25% s.d. 50%	5	10
			> 50% s.d. 75%	7	14
			> 75% s.d. 100%	9	18
38. Peralatan olahraga					
	Peralatan olahraga	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4
39. Bangunan gedung					
	Bangunan gedung tempat kerja	Renovasi	> 0% s.d. 25%	5	10
			> 25% s.d. 50%	10	20

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
			> 50% s.d. 75%	15	30
			> 75% s.d. 100%	50	100
	Bangunan gedung tempat tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5	10
			> 30% s.d 45%	10	20
			> 45% s.d 65%	15	30
40. Bangunan air					
	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1	2
			> 5% s.d. 10%	2	4
			> 10% s.d. 20%	3	6
	Bangunan air bersih/ air baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 65%	15	30
	Bangunan air kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 65%	15	30
41. Instalasi					
	Instalasi air bersih / air baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d., 45%	7	14
			> 45% s.d. 65%		
	Instalasi air kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 65%	10	20
	Instalasi pengolahan sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 65%	5	10
	Instalasi pengolahan bahan bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1	2
			> 30% s.d. 45%	3	6
			> 45% s.d. 65%	5	10
	Instalasi gardu listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 65%	15	30
42. Jaringan					
	Jaringan air minum	Overhaul	> 0% s.d, 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14

NO	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Aset (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat	
				Tahun	Semester
			> 45% s.d. 65%	10	20
	Jaringan listrik	Overhaul	> 0% s.d. 30%	5	10
			> 30% s.d. 45%	10	20
			> 45% s.d. 65%	15	30
	Jaringan telepon	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	5	10
			> 45% s.d. 65%	10	20
	Jaringan gas	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2	4
			> 30% s.d. 45%	7	14
			> 45% s.d. 65%	10	20
43. Barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga					
	Barang bercorak kesenian / kebudayaan/olahraga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1	2
			> 25% s.d. 50%	1	2
			> 50% s.d. 75%	2	4
			> 75% s.d. 100%	2	4

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,



NIP 196912061992031001